

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA (Studi Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Oleh Penuntut Umum)

Perlindungan terhadap jabatan Notaris diperlukan karena perlindungan tersebut bukan hanya untuk perlindungan Notaris, melainkan juga sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajibannya yaitu merahasiakan isi akta dan semua hal yang diberitahukan kepadanya sebagai Notaris. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh Penuntut Umum dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam penelitian ini dan penyusunan thesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *sosiolegal*. *Sosiolegal* digunakan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan validasi data dengan metode triangulasi yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori *tradism law*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris, dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notari. Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pembentukan Majelis Pengawas, Hak Ingkar Notaris, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, dan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Tugas Jabatan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF NOTARY IN CARRYING OUT THEIR DUTIES (Implementation Of The Minimum Deed And Notary Summons By The Public Prosecutor)

Protection of the position of a Notary is needed because the protection is not only for the protection of the Notary, but also as a form of the implementation of his obligations, namely keeping the contents of the deed secret and all matters that are notified to him as a Notary. This writing aims to identify and analyze the implementation of deed taking and notary summons by the Public Prosecutor and legal protection of Notaries in carrying out their duties.

In this study and the preparation of this thesis, the authors used sociolegal research methods. Sociolegal is used to explain legal issues in a more meaningful way, theoretically, enriching studies. The research specification used is descriptive analysis and data validation with the triangulation method which refers to combining various methods in a study of one particular symptom. The analytical knife in this paper uses the tradism law theory.

The results showed that the implementation of the minimum deed and notary summons by the Public Prosecutor was carried out in accordance with the laws and regulations, namely Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Regulation of the Minister of Law and Human Rights. Number M.03.HT.03.10 of 2007 which specifically regulates the taking of minutes and summons of Notaries, and Permenkum HAM Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council. Normative legal protection for Notaries has been provided by the prevailing laws and regulations, namely: Formation of the Supervisory Council, Right to Ingar Notaries, Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Indonesian Notary Association, and the Decree of the Central Supervisory Council on Granting or Rejection of Summons Notary by investigators, public prosecutors or judges.

Keywords: Legal Protection, Notary, Job Duties